



IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (STUDI KASUS MALAYSIA DAN INDONESIA)

Toni Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
toninasution@uinsu.ac.id

Abstract

Received: 05 Oktober 2024
Revised: 18 Januari 2025
Accepted: 02 April 2025

Penelitian ini membahas faktor-faktor penghambat dan kendala yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di madrasah-madrasah di Malaysia dan Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang praktik dan pengaruh implementasi Manajemen berbasis madrasah dalam konteks madrasah di Negara Malaysia dan Indonesia. Manajemen Berbasis Madrasah merupakan pendekatan yang memberikan otonomi kepada lembaga pendidikan dalam pengelolaan sekolah secara mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat, guru, dan orang tua. Di Malaysia dan Indonesia, MBM diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pemberdayaan sekolah dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya. Faktor-faktor ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, resistensi terhadap perubahan, serta infrastruktur yang tidak memadai. Di samping itu, keterlibatan orang tua yang rendah dan masalah komunikasi internal juga menjadi kendala yang signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai implementasi MBM di kedua negara serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang harus diatasi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara semua pihak, pengembangan pelatihan berkelanjutan, dan dukungan kebijakan pemerintah untuk keberhasilan MBM di Malaysia dan Indonesia.

Keywords: Manajemen Berbasis Madrasah; Malaysia; Indonesia; Faktor Penghambat; Kendala; Keberhasilan Implementasi

(*) Corresponding Author: Nasution, toninasution@uinsu.ac.id

How to Cite: Nasution, T. (2025). IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (STUDI KASUS MALAYSIA DAN INDONESIA). *Research and Development Journal of Education*, 11(1), 390-403.

INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Di Malaysia dan Indonesia, madrasah memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan agama kepada siswa Muslim. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai tantangan muncul dalam sistem pendidikan madrasah di kedua negara tersebut. Salah satu isu utama yang dihadapi adalah kurangnya penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang efektif. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah mengambil berbagai langkah, termasuk menerapkan kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah. Pendekatan ini memberikan otonomi kepada madrasah untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih mandiri, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh Nurkholis (2004), MBM memberi wewenang lebih besar kepada

madrasah dalam pengelolaan internalnya, karena pihak madrasah lebih memahami kelebihan, kekurangan, peluang, serta tantangan yang mereka hadapi. Dengan adanya otonomi ini, pengelolaan sumber daya diharapkan menjadi lebih efisien. Selain itu, MBM yang menekankan akuntabilitas juga memungkinkan adanya transparansi dalam tata kelola madrasah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Penerapan MBM dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mendorong kemandirian dan inisiatif madrasah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Selain itu, MBM juga menumbuhkan rasa tanggung jawab serta meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan di madrasah. Dalam sistem ini, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi lebih luas, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih demokratis dan transparan. MBM juga mendorong persaingan sehat antar madrasah, di mana setiap madrasah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya agar lebih unggul dibandingkan madrasah lainnya.

Keberhasilan penerapan MBM sangat bergantung pada peran kepala madrasah. Kepala madrasah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan berbagai program dan memastikan efektivitas pengelolaan madrasah. Wahjosumidjo (2005) menyatakan bahwa kepala madrasah bukan hanya seorang pengajar tetapi juga pemimpin yang bertanggung jawab atas seluruh aktivitas madrasah. Kemendiknas (2011) dalam Buku Kerja Kepala Madrasah menekankan bahwa kepala madrasah harus mampu merencanakan, mengelola, melakukan supervisi dan evaluasi, serta menjalankan kepemimpinan madrasah secara efektif.

Dengan adanya tuntutan akuntabilitas yang tinggi dalam MBM, tugas kepala madrasah menjadi semakin kompleks. Jennifer (2010) menyebutkan bahwa kepala madrasah harus menjalankan berbagai peran, termasuk sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, inovator, dan motivator (Mulyasa, 2010). Kepala madrasah tidak hanya harus mengurus administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mendefinisikan visi dan misi madrasah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepala madrasah yang efektif adalah mereka yang mampu mengelola sumber daya manusia, menyelesaikan tugas dengan baik, serta menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat madrasah.

Dengan banyaknya tanggung jawab tersebut, waktu kerja kepala madrasah menjadi tidak sebanding dengan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Secara umum, kepala madrasah hanya memiliki 24 jam kerja per minggu, di mana 6 jam digunakan untuk mengajar, sehingga hanya tersisa 18 jam untuk melaksanakan tugas administratif dan manajerial. Akibatnya, beberapa tugas tidak dapat diselesaikan secara optimal. Beban kerja yang tinggi juga dapat menyebabkan konflik peran dan tekanan bagi kepala madrasah. Dalam era otonomi pendidikan, mereka dituntut untuk meningkatkan prestasi siswa guna memenuhi standar kelulusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan meningkatkan kualitas guru melalui supervisi dan pembinaan yang efektif (Damanik, 2020). Dengan kualitas pembelajaran yang meningkat, diharapkan prestasi siswa pun ikut meningkat. Selain itu, kepala madrasah juga bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya madrasah, termasuk keuangan, guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Keberhasilan kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh dukungan berbagai pihak, seperti guru, masyarakat, dan pemerintah. Partisipasi aktif dari semua elemen madrasah akan membantu meringankan beban kerja kepala madrasah. Namun, kenyataannya, kualitas guru yang masih rendah serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan madrasah menjadi kendala dalam penerapan MBM. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap kepala madrasah masih minim, lebih banyak

difokuskan pada peningkatan kapasitas guru. Padahal, kepala madrasah memiliki peran kunci dalam keberhasilan madrasah. Saat ini, kepala madrasah di Malaysia dan Indonesia menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan MBM secara optimal. Konsep MBM menekankan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam pendidikan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Namun, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaannya (Ayub & Salim, 2018).

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Keterbatasan partisipasi dari guru, siswa, dan orang tua dalam penyusunan kebijakan madrasah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan mereka (Septya, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa semua stakeholder terlibat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan pendidikan madrasah (Ismail, 2019). Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan sumber daya juga menjadi tantangan dalam penerapan MBM. Ketidakterbukaan dalam penggunaan dana dan sumber daya lainnya dapat menyebabkan penyalahgunaan serta membuat stakeholder kesulitan memahami alokasi anggaran. Oleh karena itu, sistem pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan adil (Ali & Abdullah, 2017).

Perencanaan kurikulum yang adaptif juga menjadi faktor penting dalam MBM. Kurikulum yang disusun harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta kebutuhan siswa. Namun, dalam beberapa kasus, perencanaan kurikulum masih kurang responsif terhadap tuntutan pendidikan di madrasah. Oleh karena itu, kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan (Roslan, Abdullah, & Asmuni, 2019). Terakhir, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga menjadi kendala dalam implementasi MBM. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik dalam metode pengajaran maupun dalam manajemen madrasah. Namun, masih ada madrasah yang menghadapi kesulitan dalam mengadopsi dan mengoptimalkan penggunaan TIK. Peningkatan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi serta akses yang lebih luas terhadap sarana digital akan sangat mendukung pengembangan sistem MBM yang lebih efektif (Yeoh & Leong, 2018).

METHODS

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di Malaysia dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus, yang memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap praktik serta pengaruh implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam konteks kedua negara (Lexy, 2017). Tahapan awal penelitian meliputi seleksi madrasah sebagai sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti keberhasilan implementasi serta representasi geografis yang mencerminkan keragaman konteks madrasah di Malaysia dan Indonesia.

Setelah pemilihan madrasah, penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala madrasah, staf pengajar, dan siswa, guna memahami pengalaman, persepsi keberhasilan, kendala, serta manfaat implementasi Manajemen Berbasis Madrasah. Selain itu, dilakukan observasi langsung untuk mengamati praktik manajemen yang diterapkan dalam aktivitas harian madrasah. Observasi ini memberikan wawasan lebih rinci terkait proses pengambilan keputusan,

pengelolaan sumber daya, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah.

Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif melalui proses penggolongan, pengkategorian, serta identifikasi tema-tema yang muncul. Analisis ini dilakukan secara mendalam untuk menghasilkan interpretasi yang akurat mengenai implementasi Manajemen Berbasis Madrasah di Malaysia dan Indonesia. Hasil temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk narasi terstruktur yang memberikan gambaran rinci tentang bagaimana manajemen ini diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan Manajemen Berbasis Madrasah, serta menjadi panduan bagi pengambil kebijakan, kepala madrasah, staf pengajar, dan pihak terkait lainnya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kualitas pendidikan di madrasah.

Dalam penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap implementasi Manajemen Berbasis Madrasah. Observasi dilakukan secara cermat untuk mengamati langsung aktivitas dan interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen di madrasah. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menerapkan metode kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas.

RESULTS & DISCUSSION

Gambaran Umum Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di Di Negara Malaysia Dan Indonesia

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan inklusif. Di MIN 1 Kota Medan, struktur organisasi terdiri dari kepala madrasah yang memimpin, wakil kepala madrasah yang mengawasi berbagai bidang seperti kurikulum, kesiswaan, dan sarana-prasarana, serta guru dan staf administrasi yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk mendukung kelancaran pendidikan. Selain itu, komite madrasah yang melibatkan orang tua dan masyarakat juga berperan dalam pengelolaan sekolah.

Demikian juga di Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia, struktur organisasi dipimpin oleh pengetua yang diikuti oleh timbalan pengetua yang mengelola bidang kurikulum, hal ehwal pelajar, dan infrastruktur. Para guru bertanggung jawab atas mata pelajaran, sementara staf administrasi mendukung operasional harian. Keduanya menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yang mengutamakan kerjasama antara staf pendidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pendidikan.

Kepala madrasah di MIN 1 Medan berperan sebagai pengambil keputusan utama, fasilitator, dan motivator dalam pelaksanaan MBS, sementara wakil kepala madrasah bertugas dalam pengembangan kebijakan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru Besar Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia berpendapat bahwa peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) sangat penting. Ia bertanggung jawab merancang visi dan misi sekolah, memastikan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan tersebut, serta berperan sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Selain itu, ia juga

menekankan pentingnya membangun budaya kerja sama dan partisipasi di antara semua pihak untuk kesuksesan pelaksanaan MBS.

Naib Pengetua Sekolah Indonesia Johor Bahru menyatakan bahwa peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah sebagai pemimpin dan penggerak utama. Tugasnya mencakup perencanaan strategis, membangun visi dan misi sekolah, serta memastikan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah berperan sebagai penghubung antara guru, siswa, dan orang tua, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan kepemimpinan partisipatif, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif di sekolah.

Wakil Kepala MIN 1 Kota Medan menjelaskan bahwa pelatihan bagi guru dan staf dalam sistem Manajemen berbasis sekolah dilakukan secara rutin melalui workshop dan seminar. Pelatihan ini mencakup pengembangan manajemen, pedagogi, dan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kepala MIN 1 Kota Medan menambahkan bahwa pelatihan dilaksanakan secara berkala dengan mengundang narasumber dari luar untuk memberikan wawasan terbaru tentang manajemen pendidikan, yang dianggap penting untuk meningkatkan kemampuan guru dan staf.

Seorang guru di MIN 1 Kota Medan menjelaskan bahwa pelatihan bagi guru dan staf diadakan secara rutin, mencakup pengelolaan kelas, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan keterlibatan masyarakat. Narasumber dari luar juga diundang untuk memberikan wawasan dan praktik terbaik dalam manajemen pendidikan. Disisi lain Guru Besar Sekolah Indonesia Johor Bahru yang terdapat pada Negara Malaysia memiliki pendapat bahwa terdapat pelatihan bagi guru dan staf untuk sistem Manajemen berbasis sekolah di Sekolah Indonesia Johor Bahru menyatakan bahwa pelatihan untuk guru dan staf dilakukan secara berkala dengan berbagai program yang fokus pada keterampilan mengajar, pengembangan kurikulum, dan teknologi pendidikan. Mereka juga mengundang sumber luar untuk memberikan perspektif baru dan pengalaman praktis, sehingga guru dan staf lebih siap dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah.

Cikgu Sekolah Indonesia Johor Bahru terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendukung Manajemen berbasis sekolah di Sekolah Indonesia Johor Bahru berpendapat bahwa kerajaan yang mendukung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mencakup desentralisasi pendidikan, yang memberikan lebih banyak kuasa kepada sekolah dalam pengajaran dan pengambilan keputusan. Selain itu, ada program pembiayaan untuk meningkatkan fasilitas dan sumber pendidikan, serta kebijakan pelatihan untuk tenaga pengajar yang meningkatkan kualitas pengajaran. Semua ini bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik bagi pelajar.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru sangat signifikan. Masyarakat, yang terdiri dari orang tua, tokoh masyarakat, dan alumni, aktif terlibat dalam komite madrasah dan sekolah. Mereka memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, mendukung pendanaan, serta terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini tidak hanya menciptakan rasa memiliki terhadap institusi pendidikan, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah dan komunitas. Pertemuan rutin dengan komite madrasah memungkinkan aspirasi masyarakat didengar, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan yang lebih baik.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang responsif dan inklusif. Di MIN 1 Kota Medan, struktur organisasi terdiri dari kepala madrasah yang memimpin, wakil kepala madrasah yang mengawasi berbagai bidang, serta guru dan staf administrasi yang bertanggung jawab atas kurikulum, kesiswaan, dan sarana-prasarana. Struktur serupa juga diterapkan

di Sekolah Indonesia Johor Bahru, di mana pengetua memimpin dan timbalan pengetua mengawasi bidang-bidang tertentu seperti kurikulum dan pengembangan staf. Kedua sekolah ini menekankan pentingnya kolaborasi antara staf pendidikan, orang tua, dan komunitas untuk mendukung keberhasilan pendidikan.

Kepala madrasah di MIN 1 Kota Medan berperan sebagai pengambil keputusan utama, fasilitator, dan motivator dalam implementasi MBS. Tugasnya meliputi pengembangan visi dan misi, memimpin tim, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana. Selain itu, wakil kepala madrasah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan, memotivasi staf, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal yang sama berlaku di Sekolah Indonesia Johor Bahru, di mana pengetua berfungsi sebagai pemimpin keseluruhan dan memastikan semua aspek sekolah berjalan efektif.

Faktor-Faktor Penghambat Dan Kendala Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di Madrasah-Madrasah Di Negara Malaysia Dan Indonesia

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bertujuan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia, baik kepala sekolah, guru, maupun staf administrasi, yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip manajemen modern. Keterbatasan finansial dan dukungan komunitas juga memperburuk situasi, terutama ketika anggaran terbatas menghambat program pengembangan dan kualitas pengajaran. Selain itu, birokrasi yang rumit dalam pengelolaan dana dan pengambilan keputusan menimbulkan keterlambatan operasional, sementara keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil menghambat pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan. Resistensi terhadap perubahan dari tenaga pendidik dan staf administrasi juga menjadi penghalang dalam transisi ke MBM yang lebih efektif.

Di MIN 1 Kota Medan, beberapa faktor internal juga menghambat implementasi MBM. Kepala madrasah menyebutkan kurangnya komitmen dari staf dan guru, yang merasa nyaman dengan cara kerja yang sudah ada, serta keterbatasan pemahaman tentang konsep MBM. Selain itu, komunikasi internal yang tidak efektif sering menyebabkan kebingungan, sementara kurangnya dukungan dari pihak manajemen menyebabkan keputusan yang tidak konsisten. Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi kendala, karena tidak semua staf memiliki kompetensi yang memadai. Beberapa staf juga menunjukkan resistensi terhadap perubahan, yang menghalangi proses transisi menuju sistem manajemen yang lebih efisien. Sinergi yang kuat antara madrasah, pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan keberhasilan implementasi MBM.

Guru Besar Sekolah Indonesia Johor Bahru di Malaysia menyatakan bahwa faktor internal yang menghambat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meliputi kurangnya dukungan dari tenaga pengajar, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap perubahan. Banyak guru yang merasa nyaman dengan metode pengajaran tradisional dan enggan menyesuaikan diri dengan pendekatan baru. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif antara guru, pihak sekolah, dan orang tua juga menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tujuan dan proses MBS. Naib Pengetua menambahkan kurangnya penyesuaian antar staf dan kurangnya pemahaman tentang MBS sebagai faktor penghambat lainnya. Hal ini diperburuk oleh penglibatan guru yang minim dalam pengambilan keputusan serta budaya kerja yang tidak mendukung perubahan secara menyeluruh.

Berdasarkan wawancara dengan kepala dan wakil kepala MIN 1 Kota Medan, faktor penghambat yang ditemukan serupa, terutama terkait dengan kurangnya komitmen staf dan manajemen yang menyebabkan ketidakjelasan arah dan keputusan yang tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas juga memengaruhi penerapan MBS, mengakibatkan beban kerja yang tidak seimbang dan menurunnya kualitas pengelolaan madrasah. Guru di MIN 1 Medan juga mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga pengajar berdampak pada berkurangnya interaksi antara guru dan siswa, yang dapat memengaruhi motivasi dan hasil pembelajaran. Masalah ini memperburuk efektivitas pelaksanaan program MBS, karena tugas administratif yang menumpuk mengalihkan fokus guru dari inovasi pengajaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan rekrutmen tenaga pendidik yang memadai untuk mendukung keberhasilan MBS.

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Di Di Negara Malaysia Dan Indonesia

Penelitian ini mengkaji implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru, yang menunjukkan bahwa MBS memberikan otonomi yang signifikan kepada sekolah untuk merencanakan dan mengevaluasi program pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Hal ini mendukung teori manajemen pendidikan yang menyatakan bahwa desentralisasi meningkatkan kualitas pendidikan.

Kepala madrasah dan kepala sekolah memiliki peran krusial dalam implementasi MBS. Kepala madrasah di MIN 1 Kota Medan berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dan motivator, sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional. Kepala sekolah di Sekolah Indonesia Johor Bahru berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan sekolah dengan masyarakat, mendukung kolaborasi yang dapat meningkatkan hasil pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan madrasah juga terbukti penting, dengan komite madrasah yang terdiri dari orang tua dan tokoh masyarakat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan komunitas ini mendukung keberhasilan pendidikan.

Teknologi juga berperan dalam MBS, terutama di MIN 1 Kota Medan, dengan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan hasil belajar. Kebijakan pemerintah, seperti desentralisasi pendidikan, mendukung implementasi MBS. Program Penguatan Pendidikan Karakter dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran.

Pelatihan berkala bagi guru dan staf di kedua institusi juga penting untuk meningkatkan kompetensi mereka. Pelatihan ini mencakup pengembangan pedagogis dan penggunaan teknologi, yang membantu meningkatkan efektivitas implementasi MBS. Penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi sekolah, peran pemimpin yang efektif, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkontribusi pada keberhasilan implementasi MBS di kedua institusi tersebut.

Pendekatan yang diambil oleh kedua sekolah ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara teori dan praktik dalam pendidikan. Dengan menyediakan pelatihan yang relevan dan berkesinambungan, baik MIN 1 Kota Medan maupun Sekolah Indonesia Johor Bahru berupaya untuk mempersiapkan guru dan staf agar lebih siap menghadapi tantangan pendidikan di era modern. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan yang berkualitas dapat berdampak positif pada hasil belajar siswa (Darling-Hammond, 2009).

Dari segi kebijakan pemerintah, baik di Indonesia maupun Malaysia, terlihat adanya dukungan yang kuat terhadap implementasi MBS. Kebijakan desentralisasi pendidikan memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk mengelola anggaran dan menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Guru Besar Sekolah Indonesia Johor Bahru menyebutkan bahwa desentralisasi pendidikan memungkinkan sekolah memiliki lebih banyak kuasa dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang mengindikasikan bahwa kebijakan yang mendukung otonomi sekolah dapat menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan (Ginsburg & Stone, 2006).

Lebih jauh, kedua institusi menunjukkan bahwa keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, merupakan elemen kunci dalam keberhasilan MBS. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Teori partisipasi masyarakat dalam pendidikan menekankan bahwa kolaborasi antara sekolah dan komunitas dapat meningkatkan hasil pendidikan dan menciptakan keberlanjutan dalam pengembangan program pendidikan (Mapp & Kuttner, 2013).

Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana berbagai tantangan dan hambatan dihadapi oleh kedua institusi dalam menerapkan MBS. Di MIN 1 Kota Medan, misalnya, meskipun ada dukungan dari kepala madrasah dan partisipasi masyarakat, masih terdapat kendala dalam hal sumber daya dan fasilitas yang memadai. Beberapa guru menyatakan bahwa kurangnya pelatihan spesifik untuk mengatasi tantangan lokal dapat menghambat efektivitas program MBS. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Fullan (2006) yang menunjukkan bahwa implementasi perubahan dalam pendidikan sering kali terhambat oleh kurangnya dukungan sumber daya.

Di Sekolah Indonesia Johor Bahru, tantangan yang dihadapi mencakup kebutuhan untuk menyesuaikan kurikulum dengan konteks lokal serta memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memahami dan terlibat dalam proses MBS. Guru-guru di sekolah ini mengakui bahwa meskipun ada upaya untuk melibatkan masyarakat, sering kali tidak semua orang tua memiliki waktu atau kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif. Penelitian oleh Harris & Goodall (2008) juga menyoroti bahwa keterlibatan orang tua dapat bervariasi, tergantung pada faktor sosial dan ekonomi.

Meskipun tantangan-tantangan ini ada, kedua institusi menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus beradaptasi dan mencari solusi. Di MIN 1 Kota Medan, kepala madrasah dan staf telah mencoba untuk menjalin kemitraan lebih erat dengan komunitas lokal, dengan harapan dapat meningkatkan sumber daya pendidikan dan dukungan bagi siswa. Di Sekolah Indonesia Johor Bahru, upaya dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua melalui pertemuan rutin dan penggunaan platform digital untuk memberikan informasi yang lebih cepat dan efektif.

Dari perspektif teoritis, hasil penelitian ini juga mendukung konsep “teori perubahan” yang menyatakan bahwa perubahan dalam pendidikan harus melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Teori ini menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan (Fullan, 2006). Dengan melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat, kedua sekolah berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh budaya lokal terhadap implementasi MBS. Di Indonesia dan Malaysia, norma dan nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam cara pendidikan dikelola dan dipahami. Dalam konteks ini, MBS tidak hanya dipandang sebagai pendekatan manajerial, tetapi juga sebagai cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem pendidikan. Hal ini mencerminkan teori bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya di mana ia berada.

Dalam konteks pengembangan berkelanjutan, penelitian ini juga menekankan pentingnya evaluasi dan umpan balik dalam proses implementasi MBS. Evaluasi yang berkelanjutan memungkinkan kedua institusi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pendekatan yang diterapkan. Di MIN 1 Kota Medan, kepala madrasah mengungkapkan bahwa evaluasi rutin dilakukan untuk menilai efektivitas program dan untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen berbasis hasil yang menekankan pentingnya data dan umpan balik dalam pengambilan keputusan (Hargreaves, 2012).

Di Sekolah Indonesia Johor Bahru, pendekatan serupa diadopsi, di mana evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap capaian akademik siswa, tetapi juga terhadap keterlibatan masyarakat dan efektivitas program yang dijalankan. Guru Besar sekolah tersebut menekankan bahwa umpan balik dari orang tua dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa program yang diterapkan relevan dengan kebutuhan siswa. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa evaluasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pendidikan.

Dalam hal inovasi, kedua sekolah menunjukkan keterbukaan terhadap penerapan metode pengajaran baru yang berbasis teknologi. Di MIN 1 Kota Medan, beberapa guru telah mulai menggunakan platform digital untuk mengajar dan berkomunikasi dengan siswa. Mereka menyadari bahwa teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Di Sekolah Indonesia Johor Bahru, penggunaan aplikasi pendidikan dan media sosial telah diperkenalkan untuk memperluas akses informasi dan mendekatkan sekolah dengan orang tua.

Penggunaan teknologi ini juga mencerminkan tren global dalam pendidikan yang semakin mengarah pada pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian oleh Selwyn (2016) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga menciptakan peluang bagi interaksi yang lebih baik antara siswa dan guru. Dari segi keberlanjutan, kedua institusi berusaha untuk tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru menunjukkan bahwa keberhasilan MBS tidak semata-mata bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen semua pihak untuk terus belajar dan berinovasi. Dalam hal ini, pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional bagi guru menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan MBS secara efektif.

Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari MBS pada kualitas pendidikan. Mengingat tantangan yang dihadapi dalam implementasi, penting untuk mengeksplorasi bagaimana praktik terbaik dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks lokal. Penelitian di masa depan dapat fokus pada analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan MBS, termasuk budaya organisasi, dukungan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat. Dalam konteks kolaborasi dan inovasi, kedua institusi juga menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas tidak hanya terbatas pada orang tua, tetapi juga melibatkan berbagai pihak lain, termasuk alumni, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Di MIN 1 Kota Medan, misalnya, alumni sering diundang untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan dalam bentuk mentorship bagi siswa. Ini tidak hanya memberikan inspirasi bagi siswa, tetapi juga menciptakan jaringan yang dapat mendukung pengembangan program pendidikan.

Sekolah Indonesia Johor Bahru mengambil langkah serupa dengan membangun kemitraan dengan organisasi lokal dan sektor swasta. Melalui program kolaboratif, sekolah dapat mengakses sumber daya tambahan, seperti dana, pelatihan, dan fasilitas.

Penelitian oleh Hargreaves (2011) menunjukkan bahwa kemitraan semacam ini dapat meningkatkan kapasitas sekolah untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi, serta memperkuat hubungan antara sekolah dan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan yang dihadapi dalam membangun kolaborasi ini tidak bisa diabaikan. Terdapat kesulitan dalam menyelaraskan visi dan misi antara berbagai pemangku kepentingan, terutama ketika prioritas mereka berbeda. Di MIN 1 Kota Medan, beberapa guru mengungkapkan bahwa tidak semua orang tua memahami atau mendukung konsep MBS, yang berpotensi menghambat keterlibatan mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan manfaat MBS.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan yang ada, penting bagi kedua institusi untuk terus melakukan refleksi dan penyesuaian. Proses refleksi ini memungkinkan sekolah untuk mengevaluasi praktik mereka secara kritis dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Penelitian oleh Schön (1983) mendukung ide bahwa praktik reflektif adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran. Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah sangat penting dalam memperkuat implementasi MBS. Kebijakan yang memberikan insentif bagi sekolah untuk berinovasi dan mengembangkan program-program yang relevan dapat mendorong keberhasilan MBS. Di Indonesia, misalnya, kebijakan-kebijakan seperti dana BOS dan program Penguatan Pendidikan Karakter dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan bagaimana MBS dapat berkontribusi terhadap tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan keempat yang berfokus pada pendidikan berkualitas. MBS, dengan pendekatannya yang inklusif dan partisipatif, berpotensi memainkan peran kunci dalam mencapai pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua. Dalam penutup, penelitian ini telah mengungkapkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui otonomi, partisipasi masyarakat, pelatihan berkelanjutan, dan dukungan kebijakan, kedua institusi ini telah menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan responsif.

Meskipun tantangan tetap ada, komitmen untuk berkolaborasi dan berinovasi menjadi kunci dalam mengatasi hambatan yang muncul. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk orang tua, alumni, dan sektor swasta, memperkuat fondasi MBS dan menciptakan jaringan dukungan yang lebih luas. Dengan memperhatikan praktik reflektif dan evaluasi yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan yang tepat, MBS dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, termasuk Sustainable Development Goals (SDGs). Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan peneliti yang berupaya untuk meningkatkan sistem pendidikan di kedua negara dan di kawasan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, MBS bukan hanya sebuah pendekatan manajerial, tetapi juga sebuah proses kolaboratif yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan demikian, langkah-langkah ke depan harus terus diarahkan untuk memperkuat MBS, sehingga pendidikan yang lebih baik dapat tercapai untuk semua. Selain itu, kepemimpinan berperan krusial dalam mengatasi kendala yang muncul dalam implementasi MBS. Kepala sekolah dan manajemen harus membangun budaya kerja yang mendukung, di mana setiap staf merasa dihargai dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Teori kepemimpinan transformasional dari Astin (1993) menekankan pentingnya visi dan inspirasi dalam

memotivasi staf untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kepala sekolah di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru perlu menerapkan kepemimpinan inklusif yang mendorong partisipasi aktif semua pihak. Dengan melibatkan staf dalam perencanaan dan implementasi perubahan, mereka dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap program-program yang diterapkan.

Pemanfaatan teknologi dalam mendukung Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menjadi aspek penting dalam era digital saat ini. Teknologi dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara staf, orang tua, dan siswa melalui platform digital yang memfasilitasi berbagi informasi, pelatihan, dan kerja sama dalam proyek pendidikan. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi dapat menjadi solusi atas keterbatasan pelatihan konvensional dengan menyediakan akses ke sumber daya online, webinar, dan modul pelatihan mandiri. Penelitian oleh Frank et al. (2004) menunjukkan bahwa integrasi teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta mendukung inovasi dalam manajemen sekolah.

Evaluasi berkala terhadap implementasi MBS juga diperlukan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan menyesuaikan strategi yang ada. Model evaluasi berbasis data, seperti yang diusulkan oleh Stufflebeam (2003), dapat membantu sekolah dalam memantau kemajuan dan dampak kebijakan yang diterapkan. Partisipasi aktif siswa dan orang tua dalam proses evaluasi memberikan perspektif yang berharga mengenai efektivitas metode pengajaran dan manajemen yang digunakan. Selain itu, membangun kemitraan dengan lembaga pendidikan lain, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal dapat memperkuat dukungan terhadap implementasi MBS dalam hal sumber daya, pelatihan, dan kolaborasi. Keberhasilan MBS di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup pelibatan pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi, evaluasi berkala, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat setempat agar lebih mudah diterapkan dan diterima. Penelitian oleh Fullan (2006) menunjukkan bahwa kurikulum yang terintegrasi dengan konteks lokal dapat meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan mereka dalam proses belajar.

Kolaborasi dengan komunitas lokal dan pemangku kepentingan luar dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah dapat mengundang ahli atau praktisi dari berbagai bidang untuk memberikan wawasan dan pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan siswa. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah juga sangat penting dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Kebijakan yang jelas dan konsisten, termasuk penyediaan anggaran, pelatihan guru, dan fasilitas pendidikan, dapat memperkuat landasan MBS serta mengurangi resistensi terhadap perubahan. McLaughlin & Talbert (2003) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang kuat dapat meningkatkan efektivitas program yang diterapkan.

Penelitian dan pengembangan dalam konteks pendidikan juga perlu diperhatikan agar sekolah dapat mengidentifikasi dan menerapkan strategi terbaik. Sekolah perlu membangun budaya yang mendukung inovasi, di mana guru merasa aman untuk bereksperimen dengan metode pengajaran baru. Hargreaves (2012) menunjukkan bahwa budaya kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengajaran serta hasil belajar siswa. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai manfaat MBS sangat penting untuk meningkatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi MBS harus menjadi fokus utama, di mana sistem penilaian berbasis data dapat membantu sekolah mengukur dampak kebijakan terhadap pembelajaran siswa, keterlibatan guru, dan partisipasi orang tua. Pengembangan kapasitas staf melalui program pelatihan yang berkelanjutan juga sangat diperlukan agar guru terus

mengembangkan keterampilan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepuasan kerja serta kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan hasil akademis. Sekolah perlu memberikan peluang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui forum siswa, kelompok diskusi, atau proyek kolaboratif. Keterlibatan aktif ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses belajar. Selain itu, membangun hubungan yang kuat dengan komunitas sekitar juga menjadi faktor kunci. Kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, dan bisnis lokal dapat memberikan dukungan tambahan berupa sumber daya, pelatihan, serta pengalaman nyata yang memperkaya pembelajaran. Kolaborasi ini dapat meningkatkan kinerja akademis siswa serta keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka.

Dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru, strategi komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara guru, siswa, orang tua, dan manajemen memastikan bahwa setiap pihak memahami tujuan dan proses yang terlibat dalam MBS. Sekolah dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk situs web, media sosial, dan aplikasi digital, untuk menyampaikan informasi serta mendorong partisipasi aktif. McTighe dan Wiggins menekankan bahwa komunikasi yang efektif meningkatkan kolaborasi dan rasa memiliki terhadap program pendidikan. Selain itu, membangun budaya reflektif di sekolah juga penting, di mana guru secara aktif merenungkan praktik mereka, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain. Forum diskusi reguler dan kelompok belajar dapat mendukung pengembangan profesional berkelanjutan, sebagaimana disarankan oleh Hargreaves (2012), yang menekankan bahwa kolaborasi antarguru dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan efektivitas pendidikan.

Pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pendidikan. Sekolah harus menggunakan data dan penelitian untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki serta mengembangkan strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan menganalisis hasil belajar siswa, sekolah dapat merumuskan kebijakan berbasis data yang lebih akurat dalam mengukur efektivitas program pendidikan. Keputusan yang diambil dengan pendekatan ini akan lebih terarah, meningkatkan keberhasilan proses belajar mengajar, dan membantu pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) harus diperkuat dengan menciptakan lebih banyak peluang partisipasi, seperti pertemuan, lokakarya, dan kegiatan sukarela. Hubungan yang erat antara rumah dan sekolah dapat meningkatkan dukungan bagi siswa dalam proses pembelajaran. Perhatian terhadap kesejahteraan mental dan emosional guru serta siswa juga menjadi faktor krusial. Sekolah perlu menyediakan program dukungan psikologis, seperti konseling dan kegiatan pengembangan diri, untuk membantu mengatasi stres dan tekanan akademik. Lingkungan sekolah yang mendukung secara emosional dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa, membantu mereka mengelola tekanan akademik, serta mendorong keterampilan sosial dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, siswa lebih fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil belajar yang optimal.

Integrasi strategi komunikasi yang efektif, budaya reflektif, penggunaan data dalam pengambilan keputusan, keterlibatan orang tua, dan fokus pada kesejahteraan mental dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan responsif. Pendekatan holistik ini memperkuat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) serta memberikan dampak positif berkelanjutan bagi siswa, guru, dan masyarakat. Pentingnya

kebijakan yang fleksibel dan responsif, yang ditinjau secara berkala, juga mendukung keberhasilan MBS. Selain itu, mendorong suasana inovatif di sekolah, di mana ide-ide baru dihargai, dapat meningkatkan kreativitas dan kualitas pendidikan. Dengan komitmen semua pemangku kepentingan, tantangan dapat diatasi, dan MBS akan memberikan dampak positif berkelanjutan.

CONCLUSION

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di MIN 1 Kota Medan dan Sekolah Indonesia Johor Bahru dapat meningkatkan kualitas pendidikan melalui otonomi sekolah, partisipasi masyarakat, dan pelatihan berkelanjutan. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan komunitas, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif meskipun ada tantangan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat seperti kurangnya komitmen staf, keterbatasan sumber daya manusia, masalah komunikasi, serta infrastruktur yang tidak memadai memengaruhi efektivitas program. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan kolaboratif dan dukungan kebijakan pemerintah yang konsisten agar implementasi MBS dapat berjalan lebih efektif dan meningkatkan kualitas pendidikan.

REFERENCES

- Ali, M., & Abdullah, M. N. (2017). Transparency in Resource Management: A Prerequisite for Effective School-Based Management in Madrasah. *Malaysian Journal of Educational Administration, 30(2)*.
- Astin, A. W. (1993). *What Matters in College: Four Critical Years Revisited*. Jossey-Bass.
- Ayub, Z., & Salim, S. S. (2018). Challenges in Implementing School-Based Management in Madrasah: A Case Study in Malaysia. *International Journal of Educational Management, 32(6)*.
- Damanik, M. H. (2020). *Integrasi nilai-nilai Religius pada Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Kota Batu*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Darling-Hammond, L., D. (2009). *Professional learning in the learning profession*. National Staff Development Council.
- Frank, K. A., Zhao, Y., & Borman, K. (2004). Social Capital and the Diffusion of Innovations within Organizations. *Application to the Implementation of Computer Technology in Schools. Sociology of Education, 77(2)*.
- Fullan, M. (2006). Leading professional learning. The school administrator. In *Retrieved*.
- Ginsburg, M. B., & Stone, J. (2006). The Role of Education Policy in Improving Student Achievement. *Educational Policy Analysis Archives, 14(12)*.
- Hargreaves, A. (2011). International Journal of Leadership in Education The emotional politics of teaching and teacher development: with implicatinos for educational leadership. *Leadership, January 2012, 37–41*.
- Hargreaves, A. (2012). *Professional Capital: Transforming Teaching In Every School*. Routledge.
- Harris, A., & Goodall, J. (2008). (2008). Do Parents Know They Matter? Engaging All Parents in Learning. *Educational Research, 50(3)*.
- Ismail, I. (2019). Stakeholder Participation in Decision-Making: A Key Factor in Successful School-Based Management in Madrasah. *Educational Management*

- Administration & Leadership*, 47(3).
- Lexy, J. M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Jennifer, A. (2010). The Role of School Principal in the Implementation of School- Based Management: A Review of Literature. *Journal of Educational Leadership, Policy, and Practice*, 25(2), 78–95.
- Mapp, K. L., & Kuttner, P. J. (2013). *Partners in Education: A Dual Capacity- Building Framework for Family-School Partnerships*. SEDL.
- McLaughlin, M. W., & Talbert, J. E. (2003). *Professional communities and the work of high school teaching*. University of Chicago Press.
- Mulyasa. (2010). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara.
- Nasional, K. P. (2011). *Buku Kerja Kepala Madrasah*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Nurkholis. (2004). Enhancing School Effectiveness and Efficiency through School-Based Management: A Practical Approach. *Educational Administration Quarterly*, 24(4), 127–141.
- Roslan, S., Abdullah, A. H., & Asmuni, A. (2019). Responsive Curriculum Planning: A Cornerstone of School-Based Management in Madrasah. *Journal of Educational Planning and Administration*, 33(1).
- Septya, et al. (2024). Faktor sosial budaya dan pengembangan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar. *MODELING: Jurnal Program Studi PGM*, 11(1), 42–52.
- Thomas, R. (2009). The Changing Role of the School Principal: A Review of Literature. Educational Management. *Administration, and Leadership*, 37(1), 10--30.
- Wahjosumidjo. (2005). *Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya*. Raja Grafindo.
- Yeoh, T. Y., & Leong, W. K. (2018). Enhancing School-Based Management through Information and Communication Technology (ICT) Integration. *Journal of Information Technology Education: Research*, 17(1).